

STRATEGI TIONGKOK DALAM MERESPON PEMBENTUKAN PAKTA AUKUS

by Venny Yulia Hartanti

Submission date: 17-Oct-2023 09:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2194383944

File name: Ujian_Skripsi_Aji_Ridha_Tiara_Mawarni_HIB19_1902046083.docx (572.94K)

Word count: 12201

Character count: 84382

**STRATEGI TIONGKOK DALAM MERESPON PEMBENTUKAN
PAKTA AUKUS**

4
SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata I

Oleh

AJI RIDHA TIARA MAWARNI

NIM.1902046083



4
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Strategi Tiongkok Dalam Merespon
Pembentukan Pakta AUKUS

Nama : Aji Ridha Tiara Mawarni

NIM :1902046083

Program Studi :Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas :Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Menyetujui:

Pembimbing,



Chairul Aftah, S. IP, MIA

19730615 200312 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diprotes menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 13 Oktober 2023

Penulis,

Aji Ridha Tiara Mawarni
1902046083

ABSTRACT

Australia, the United Kingdom, and the United States (AUKUS) is a trilateral defense pact initiated by three major countries in the world, namely Australia, the United Kingdom, and the United States. On September 15, 2021. The idea of AUKUS was also formed to focus on cutting-edge technologies in the field of security and defense, particularly in the development of quantum technology. The cooperation also has a plan that will involve information exchange, underwater capability development, and can be mutually beneficial in developing the security industrial base. The AUKUS pact itself is expected to enhance collective capabilities in the security sector, especially in the mission of preventing Chinese expansionism, especially in the Indo-Pacific region. From the United States' point of view, AUKUS is seen as a strategy of the United States to maintain its dominance in international relations, particularly regarding competition between the United States and China, through the achievement of its power. The purpose of this study is to determine China's strategy in responding to the formation of the AUKUS pact.

This research is a type of qualitative research using descriptive research methods, data collection techniques using literature studies whose data sources are secondary data sources because they are obtained through books, journals and also the internet. In addition, this research uses Neorealism and Balance of Power theories which are used to identify existing problems so as to reach the stage of making decisions.

The results of the study found that China's strategy in responding to the establishment of the AUKUS pact is to carry out a Speech Act such as open criticism to emphasize that the AUKUS agreement is harmful to many parties. This is also supported by China's strong statement that the agreement between the three countries is a new model of Western provocation. China considers AUKUS to be a threat to regional security, especially in the Indo-Pacific region. China's military modernization has also been strengthened by aggressive military activity with its closest ally, Russia.

Keywords: AUKUS, Strategy, China, Response, Military

ABSTRAK

¹ *Australia, United Kingdom, and United States (AUKUS)* merupakan pakta pertahanan trilateral yang diinisiasi oleh tiga negara besar di dunia, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada 15 September 2021. Ide AUKUS juga dibentuk untuk fokus pada teknologi mutakhir di bidang keamanan dan pertahanan, khususnya dalam pengembangan teknologi kuantum. Kerja sama ini juga memiliki rencana yang akan melibatkan pertukaran informasi, pengembangan kemampuan bawah air, dan dapat saling menguntungkan dalam mengembangkan basis industri keamanan. Pakta AUKUS sendiri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kolektif di sektor keamanan, khususnya dalam misi mencegah ekspansionisme Tiongkok, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Dari sudut pandang Amerika Serikat, AUKUS dilihat sebagai strategi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya dalam hubungan internasional, khususnya terkait persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, melalui pencapaian *sea power*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi Tiongkok dalam merespon pembentukan pakta AUKUS.

¹² Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang sumber datanya merupakan sumber data sekunder karena didapatkan melalui buku, jurnal dan juga internet. Selain itu penelitian ini menggunakan teori *Neorealism dan Balance of Power* yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga mencapai tahapan untuk mengambil keputusan.

Hasil penelitian menemukan bahwa Strategi Tiongkok dalam merespon adanya pembentukan pakta AUKUS ialah dengan melakukan *Speech Act* seperti kritik terbuka untuk menekankan bahwa perjanjian AUKUS berbahaya bagi banyak pihak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan keras Tiongkok yang menilai bahwa kesepakatan ketiga negara tersebut merupakan model baru provokasi Barat. Tiongkok sendiri menilai AUKUS dapat menjadi ancaman bagi keamanan kawasan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Serta, Modernisasi militer Tiongkok juga diperkuat dengan agresifnya aktivitas militer yang dilakukan bersama sekutu terdekatnya, Rusia .

Kata kunci: AUKUS, Strategi, Tiongkok, Respon, Militer

RIWAYAT HIDUP



Aji Ridha Tiara Mawarni lahir pada tanggal 24 November 2001 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Merupakan anak pertama dari Bapak Drs. Aji Danny, Msi dan Ibu Rina Earlita Sukmawati, SE. Pada tahun 2007 memulai pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 1 Samarinda dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Samarinda dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Samarinda dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Pada bulan Juni-Agustus 2022 melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Tiongkok Dalam Merespon Pembentukan Pakta AUKUS”. Skripsi ini membahas mengenai strategi Tiongkok dalam merespon pembentukan pakta AUKUS berdasarkan teori *Neorealism dan Balance of Power*. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan adanya dukungan dan masukan dari berbagai pihak, skripsi ini pun dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam mendukung penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Drs. Aji Danny, M.si dan Ibu Rina Earlita Sukmawati, SE yang telah melahirkan , tulus Ikhlas membesarkan, merawat, memberikan dukungan moral materil serta selalu memberi doa dan cinta kasih yang tak terhingga.
2. Adik penulis tercinta, Caca, Aisya, Aqilla dan semua keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung atas keberhasilan penulis dalam mengerjakan skripsi.

3. Bapak Chairul Aftah,S.IP, MIA selaku dosen pembimbing ,Ibu Uni W.Sagena,M.Si, Ph.D dan Bapak Arif Wicaksa,MA selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan maupun saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rendy Wirawan, M.IR selaku dosen penasihat dan Ibu Frisca Alexandra, S.IP,MA selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praktikum yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan solusi,motivasi dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pengajar maupun staff program studi Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang berharga dan membantu dalam memberikan kemudahan dalam administrasi selama penulis menempuh Pendidikan sarjana di Universitas Mulawarman.
6. Kating HI B yaitu Wafiq Halidsyam dan rekan rekan HI B Angkatan 2019 yang sangat penulis hormati dan sayangi yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis tercinta sejak SMP,SMA hingga kuliah yaitu Adel,Anastasia,Celomita,Delia,Farah,Gaby,Hemy,Jane,Sheren,Sisca,Tessa ,Trya,Orin,Vischa yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 24
8. Terakhir,terima kasih untuk diri sendiri ,karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.Terima kasih telah bertahan. You did very well!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Neorealisme Defensif (<i>Devensive Neorealism</i>)	17
2.2.2 Keseimbangan Kekuatan (<i>Balance of Power</i>)	19
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data	22
BAB IV	23

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Pembentukan Pakta AUKUS	23
4.2 Tiongkok Sebagai Kekuatan Global Baru	29
4.3 Respon Tiongkok Terhadap Pembentukan Pakta AUKUS	38
4.3.1 Modernisasi Militer Tiongkok Menyikapi Kehadiran AUKUS	43
17 BAB V	51
PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	54

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tanggapan Negara-Negara Lain Terhadap AUKUS 6

Daftar Gambar

Gambar 4.1. Peningkatan Pengeluaran Militer Tiongkok Tahun 2010-2021 36

Gambar 4.3.1 Estimasi Pengeluaran Sektor Pertahanan Tiongkok..... 50

Gambar 4.3.2 Perbandingan Anggaran Pertahanan Tiongkok vs Negara-Negara di
Kawasan Indo-Pasifik 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

¹ *Australia, United Kingdom, and United States (AUKUS)* merupakan pakta pertahanan **trilateral** yang diinisiasi oleh tiga negara besar ¹³ **di dunia, yaitu** Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada 15 September 2021, tiga pejabat tinggi negara, yaitu ²⁶ Scott Morrison (Perdana Menteri Australia), Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris), dan Joseph Biden (Presiden Amerika Serikat) resmi membentuk kerja sama keamanan yang dikenal dengan AUKUS. Pakta pertahanan tersebut memiliki tujuan untuk kerja sama keamanan melalui rencana kolaborasi dalam mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, khususnya untuk Australia (Office, 2021).

Ide AUKUS juga dibentuk untuk fokus pada teknologi mutakhir di bidang keamanan dan pertahanan, khususnya dalam pengembangan teknologi kuantum. Kerja sama ini juga memiliki rencana yang akan melibatkan pertukaran informasi, pengembangan kemampuan bawah air, dan dapat saling menguntungkan dalam mengembangkan basis industri keamanan. Pakta keamanan dan pertahanan tersebut juga diharapkan dapat saling melengkapi dalam hal pertahanan dan keamanan bersama (Shoebridge, 2021).

Pakta AUKUS sendiri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kolektif di sektor keamanan, khususnya dalam misi mencegah ekspansionisme Tiongkok, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Inggris, pembentukan AUKUS adalah peluang besar untuk memainkan peran penting dan terlibat lebih

jauh di kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, AUKUS juga dapat menjadi potensi yang menggiurkan bagi Inggris, terutama di bidang industri seperti pembuatan kapal dengan teknologi tinggi. Selain itu, AUKUS juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan citra Inggris di kancah internasional dengan kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat perhatian keamanan baru bagi Inggris dan membantu Australia sebagai mitra untuk menjaga stabilitas kawasan di Kawasan Indo-Pasifik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi Amerika Serikat, AUKUS merupakan peluang strategis untuk meminimalisir pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat juga memandang bahwa keberadaan AUKUS dapat menjadi acuan utama bagi pemerintahan Biden dalam misinya membentuk kemitraan yang lebih kuat di sektor keamanan guna menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Indo-Pasifik(Din Aulia & Sahide, 2022).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempublikasikan *National Security Strategic Guidance* pada awal 2021 yang menekankan pada sikap Tiongkok yang semakin agresif. Dalam panduan tersebut, Presiden Biden menyebut Tiongkok sebagai satu-satunya kompetitor yang memiliki kapabilitas dalam mengkombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi, militer, dan teknologi hingga menimbulkan tantangan bagi sistem internasional yang stabil dan bebas (Outlook, 2021).

Hal ini tentu saja terkait dengan meningkatnya ancaman Tiongkok di kawasan, sehingga Amerika Serikat dan sekutunya perlu memandang kawasan IndoPasifik sebagai kawasan penting bagi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu, Australia sendiri memahami bahwa

keterlibatannya¹⁴ dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam pembentukan AUKUS telah menjadikan Australia sebagai negara yang akan menerima bantuan transformasi teknologi berupa kapal selam bertenaga nuklir sehingga pembentukan AUKUS sangat bermanfaat bagi Australia untuk melindungi nilai-nilai bersama serta memajukan keamanan dan kemakmuran dengan negara tersebut di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pakta pertahanan itu menciptakan harapan dan keyakinan yang tinggi bagi Australia untuk terlibat lebih jauh dalam menjaga stabilitas regional di tengah meningkatnya ancaman keamanan, terutama dari Tiongkok (Brooke-Holland et al., 2021).

Australia akan mendapatkan keuntungan keamanan dengan bergabung¹⁴ dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam pakta AUKUS. Dalam hal ini, Australia akan mendapatkan fasilitas pertahanan berupa kapal selam bertenaga nuklir yang memiliki kemampuan tinggi dengan kecepatan, jangkauan, dan daya tahan yang lebih canggih dan secara signifikan lebih canggih dibandingkan armada bertenaga konvensional lainnya.

Hal ini menjadikan Australia sebagai modal penting untuk menyeimbangkan Tiongkok dalam hal kemampuan militer untuk setidaknya memberikan perlawanan akibat paksaan ekonomi yang diberlakukan oleh China. Sementara itu, kerja sama pertahanan dapat meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Australia melalui akuisisi rudal jelajah Tomahawk, dan rudal anti-kapal jarak jauh, serta kolaborasi dengan Amerika Serikat dalam mengembangkan rudal hipersonik. Sementara bagi Amerika dan Inggris, memberikan bantuan transformasi teknologi keamanan kepada Australia dapat menjadi manfaat ekonomi

bagi kedua negara melalui pengembangan industri akibat pembelian atau penyewaan kapal selam buatan Australia kepada kedua negara tersebut (Lee, 2021).

Kehadiran pakta AUKUS menjadi sorotan di kancah internasional, terutama bagi negara-negara yang menganggap bahwa kerja sama di sektor keamanan dan pertahanan dapat menjadi ancaman baru di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok merupakan negara yang sangat menentang keberadaan pakta AUKUS. Bagi China, pembentukan AUKUS dapat mengganggu stabilitas kawasan dan merusak perdamaian yang akan berdampak pada terciptanya perlombaan senjata antar negara. AUKUS juga dilihat oleh Tiongkok sebagai kemitraan yang mengacu pada anti-Tiongkok dan berpikir bahwa kemitraan tersebut dapat memicu konfrontasi militer (Marlow, 2021).

Di sisi lain, berlangsungnya pakta AUKUS menandai berakhirnya kerja sama antara Australia dan Perancis yang dimulai sejak tahun 2016 untuk membangun dua belas kapal selam bertenaga diesel pengganti kapal selam Collins milik Australia senilai USD 66 miliar (Cheng, 2022). Keputusan tersebut berkaitan dengan kepentingan Australia untuk memodernisasi dan memperbaiki kapabilitas pertahanannya seperti yang tertulis dalam *2020 Defense Strategic Update* (Department of Defence, 2020). Lebih lanjut, dalam *2016 Defence White Paper*, Australia menyatakan keinginannya untuk mengembangkan kapal selam yang superior dalam lingkup regional.

Namun, hasil kerja sama pembangunan kapal selam diesel antara Australia dan Perancis baru dapat digunakan pada tahun 2054, dan pada waktu tersebut, kapal itu tidak akan superior dibandingkan kapal selam nuklir Tiongkok yang

diestimasikan akan digunakan pada tahun 2040. Bahkan, banyak ahli menyatakan bahwa pada tahun 2035, kemampuan angkatan laut Tiongkok akan melebihi kekuatan Amerika Serikat dan hal tersebut menunjukkan semakin tidak asimetrisnya kekuatan militer Tiongkok dan Australia (Mole, 2021). Disisi lain, kapal kelas *Virginia* milik Amerika Serikat dan *Astute* milik Inggris dinilai lebih cocok, dibanding kapal selam diesel buatan Perancis, untuk menjadi gambaran bagi pengembangan kapal selam Australia.

Kapal selam nuklir memiliki kemampuan pertahanan tingkat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai *deterrence* tanpa negara yang bersangkutan perlu memiliki senjata nuklir (Tewari, 2021). Oleh karena itu, melalui AUKUS, Australia dapat memperbaiki kapabilitas militernya dengan lebih maksimal serta mendapat jaminan keamanan yang lebih besar karena keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris (Wilkins, 2021). Melalui pakta AUKUS, Australia akan membangun setidaknya delapan kapal selam nuklir yang sesuai dengan spesifikasi kapal dari AS dan Inggris.

Pakta AUKUS juga memberi kesempatan bagi Australia untuk memperluas pengaruhnya dalam lingkup regional melalui kerja sama dengan negara-negara yang lebih besar. Pakta AUKUS tidak hanya terfokus pada kerja sama pertahanan, tetapi juga pengembangan teknologi yang tidak mampu Australia kembangkan sendiri, seperti kapabilitas siber, *artificial intelligence*, teknologi kuantum, dan kapabilitas bawah laut. Australia, sebagai *middle power*, dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri dan mengeluarkan biaya pembangunan yang besar.

Karenanya, dengan kerja sama melalui pakta AUKUS, Australia dapat mengakses teknologi dari Amerika Serikat dan Inggris untuk kemudian mengembangkan teknologi dalam negeri milik Australia sendiri (Wilkins, 2021). Dari sudut pandang Amerika Serikat, AUKUS dilihat sebagai strategi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya dalam hubungan internasional, khususnya terkait persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, melalui pencapaian *sea power* (Cheng, 2022).

Tabel 1.1 Tanggapan Negara-Negara Lain Terhadap AUKUS

Pro	Kontra	Netral
Filipina	Perancis	Thailand
Singapura	Malaysia	
Vietnam	Indonesia	

Pembentukan pakta AUKUS mendapatkan berbagai reaksi dari negara-negara lain. Seperti misalnya ³⁵ Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian menyatakan bahwa Perancis merasa dikhianati dengan adanya pakta AUKUS, baik karena pembatalan kerja sama dengan Australia ataupun karena pakta AUKUS tidak melibatkan Perancis.

Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta penarikan duta besar dari Amerika Serikat dan Australia sebagai penolakan atas sikap aliansi dan mitra Perancis di pakta AUKUS. Presiden Macron juga mengajak negara-negara Eropa lainnya untuk tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat karena fokus Amerika Serikat yang beralih ke kawasan Indo-

Pasifik dan peningkatan pengaruh Tiongkok yang mengkhawatirkan negara-negara Barat (Al Jazeera, 2021). Selanjutnya, AUKUS bertujuan untuk melengkapi mekanisme regional lainnya yang ada di kawasan Indo-Pasifik, misalnya ASEAN.

Hal tersebut tidak mengurangi kekhawatiran negara-negara anggota ASEAN terkait pakta AUKUS. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan kekhawatirannya jika pakta AUKUS justru akan mendorong negara-negara lainnya untuk bersikap lebih agresif di kawasan, khususnya di Laut Tiongkok Selatan, tempat dimana terdapat beberapa negara dengan kepentingan yang bertentangan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menyatakan kekhawatirannya akan perlombaan persenjataan dan proyeksi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

Menanggapi respon dari negara-negara Asia Tenggara, Australia menyatakan komitmennya terhadap pembangunan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara (Southgate, 2021). Lalu, ada pula badan keamanan nasional Filipina telah menyambut AUKUS meskipun Presiden Duterte berbagi keprihatinan dengan ¹¹ Malaysia dan Indonesia. Singapura dan Vietnam secara implisit mendukung pakta tripartit, sementara Thailand tetap bungkam (Choong, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berupaya untuk menjelaskan bagaimana strategi Tiongkok dalam merespon pembentukan pakta AUKUS pada tahun 2021. Alasan penulis memilih studi kasus ini karena AUKUS merupakan pakta pertahanan baru sehingga memungkinkan banyak fenomena yang terjadi. Tiongkok dipilih sebagai indikator karena Tiongkok salah satu negara penantang eksistensi Amerika Serikat yang ingin mengubah status quo.

Di samping itu, dari sudut pandang negara-negara AUKUS, Tiongkok merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas regional, serta dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki kapabilitas untuk memunculkan ancaman di berbagai sektor dalam lingkup regional Asia Pasifik.

¹⁶ 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Tiongkok Dalam Merespon Pembentukan Pakta AUKUS ?

⁴ 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa strategi Tiongkok dalam merespon adanya pembentukan Pakta AUKUS.

⁵ 1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka akan memperluas kajian ilmu hubungan internasional tentang strategi Tiongkok dalam merespon adanya pembentukan Pakta AUKUS .

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan lebih banyak negara negara yang meningkatkan kekuatan militer dan keamanannya terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regionalnya.

³ BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini akan penulis kaitkan dengan tiga penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis seperti penelitian M.Cheng dalam penelitiannya yang berjudul ¹*AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications*, kemudian penelitian Marta Marafona dalam penelitiannya yang berjudul ⁶*European reactions to AUKUS and implications for EU strategic autonomy*, dan penelitian Mingjiang Li dalam penelitiannya yang berjudul ⁶*ASEAN's responses to AUKUS: implications for strategic realignments in the Indo Pacific*. sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas.

Jurnal M.Cheng dalam penelitiannya yang berjudul ¹*AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications* menjelaskan tentang AUKUS merupakan pakta aliansi keamanan trilateral antara Australia, AS, dan Inggris sejak tahun 2021, yang mana AS berkomitmen untuk menyediakan kapal selam nuklir bagi Australia. Kepentingan Australia sendiri untuk membentuk AUKUS disebabkan karena upaya retrofit berbagai kapal selam milik Australia serta kerja sama dengan Perancis perihal pembelian kapal selam dinilai kurang memenuhi kepentingan Australia. Di sisi lain, tuntutan domestik Australia akibat renggangnya hubungan dengan Tiongkok yang berdampak pada perekonomian Australia, didukung dengan menurunnya pengaruh Australia di Kawasan Asia-Pasifik, membuat Australia menerima AS dan Inggris untuk mendirikan AUKUS.

Sementara itu, meningkatnya pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia-Pasifik menjadi perhatian AS yang khawatir geopolitiknya melemah sehingga membutuhkan AUKUS untuk membendung pengaruh Tiongkok. Namun, pendirian AUKUS justru dapat mendorong situasi security dilemma bagi ASEAN yang secara geografis terletak di antara Australia dengan Tiongkok, yang mana hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan keamanan dan perdamaian di Asia-Pasifik dengan keberadaan AUKUS dan kapal selam nuklir milik Australia. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Landasan teori pada penelitian ini adalah geopolitik.

Jurnal Marta Marafona dalam penelitiannya yang berjudul *European reactions to AUKUS and implications for EU strategic autonomy* menjelaskan tentang Pada dasarnya, baik Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memiliki respons yang berbeda terhadap AUKUS. Uni Eropa, Perancis, dan Portugal mengancam negosiasi AUKUS yang dianggap mengkhianati kerja sama antara Perancis dengan Australia sekaligus memunculkan sentiment terhadap AS. Sementara itu, Yunani merespons dengan mengumumkan kerja sama pembelian kapal perang dengan Perancis sebagai bentuk strategi keamanan. Di sisi lain, Jerman merespons dengan menegaskan pentingnya kapasitas kebijakan keamanan luar negeri Uni Eropa dan menganggap bisa memediasi antara AS dengan Perancis. Polandia menilai AUKUS sebagai pengabaian terhadap Eropa, tetapi menghargai upaya AS untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok.

Bagi otonomi strategis Uni Eropa, keberadaan AUKUS menjadi sinyal bagi Uni Eropa untuk meningkatkan kapasitas militernya, di sisi lain, penting juga untuk

menjaga kerja sama ekonomi dengan Tiongkok untuk menekan pengaruhnya di Indo-Pasifik. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Landasan teori pada penelitian ini adalah Liberalisme institusional.

Jurnal Mingjiang Li dalam penelitiannya yang berjudul *ASEAN's responses to AUKUS: implications for strategic realignments in the Indo-Pacific* menjelaskan tentang Negara-Negara anggota ASEAN memiliki respons yang beragam terkait dengan terbentuknya AUKUS. Sebagai kawasan regional yang terletak di antara Tiongkok dengan Australia, tentunya keberadaan AUKUS menjadi perhatian sendiri. Indonesia dan Malaysia merasa khawatir dengan keberadaan AUKUS dan kapal selam nuklir Australia dapat menyebabkan ketidakstabilan kawasan serta berdampak pada proliferasi nuklir. Sementara itu, Thailand tidak memiliki respons khusus, tetapi menegaskan bahwa negaranya mendukung pelarangan senjata nuklir sebagai respons tidak langsung terhadap AUKUS. Kamboja merespons dengan harapan agar AUKUS tidak menyebabkan ketidakstabilan kawasan Asia-Pasifik, sementara Brunei khawatir AUKUS dapat memicu meningkatnya tensi antara AS dengan Tiongkok. Di sisi lain, Singapura, Vietnam, dan Filipina merespons positif terkait keberadaan AUKUS.

Namun beberapa respons dari negara-negara ASEAN dapat menjadi landasan bagi AUKUS untuk membuat strategi kerja sama yang lebih fleksibel sehingga organisasi seperti ASEAN dapat condong mendukung AUKUS. Di sisi lain, Tiongkok juga dapat mendorong kerja sama yang lebih erat dengan ASEAN untuk menjaga pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Pada penelitian ini metode

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Landasan teori pada penelitian ini adalah geopolitik.

Berdasarkan tiga penelitian yang telah disebutkan diatas, ada beberapa hal yang menunjukkan persamaan dan perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Secara umum persamaan dari ketiga penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki fokus penelitian mengenai pembentukan Pakta AUKUS dan sama sama menggunakan Teknik analisis data kualitatif serta jenis penelitian deskriptif.

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada variabel negara, metode penelitian, jenis penelitian dan respon terhadap terbentuknya Pakta AUKUS. Seperti pada penelitian M.Cheng yang melihat kemarahan Perancis karna adanya pembentukan Pakta AUKUS dan pada penelitian ini menggunakan Geopolitik sebagai landasan teori. Pada penelitian Marta Marafona lebih meninjau respon negara Eropa dan pada penelitian ini menggunakan Liberalisme institusional sebagai landasan teori. Pada penelitian Mingjiang Li lebih meninjau kepada respons negara-negara Asia Tenggara terhadap AUKUS dan pada penelitian ini menggunakan Geopolitik sebagai landasan teori.

2.2 Landasan Teori

Pada latar belakang, telah dijelaskan mengenai indikasi ketegangan hubungan Tiongkok dengan negara aliansi AUKUS dan terbentuknya Pakta Aukus tahun 2021. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Neorealisme Defensif (*Devensive Neorealism*) dan Keseimbangan kekuatan (*Balance of Power*) untuk menjawab rumusan masalah penulis yaitu Bagaimana Strategi Tiongkok dalam

merespon pembentukan Pakta AUKUS tahun 2021. maka kerangka berpikir yang digunakan penulis adalah teori Neorealisme (*Neorealism*) dan Keseimbangan kekuatan (*Balance of Power*) menurut Kenneth Waltz .

2.2.1 Neorealisme Defensif (*Deensive Neorealism*)

Neorealisme defensif berasal dari teori realisme struktural yang pertama kali dikembangkan oleh Kenneth N. Waltz dalam tulisannya yang berjudul *Theory of International Politics*. Secara garis besar, realisme struktural menyatakan bahwa sistem internasional yang anarki, ditambah dengan distribusi kapabilitas yang tidak merata, menjadi batasan bagi sikap negara terhadap negara lain. Dalam situasi yang anarki, keamanan negara merupakan tujuan utama. Hanya jika negara berhasil bertahan hidup dalam sistem yang anarki, negara dapat mencapai tujuan lainnya, seperti ketentraman, keuntungan, dan kekuasaan (Waltz 1979). Lebih lanjut, Waltz menyatakan bahwa walaupun negara selalu berupaya untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya, tetapi fokus utama dari negara adalah untuk mempertahankan posisinya dalam sistem, dimana hal tersebut hanya dapat dicapai ketika keamanan negara telah terpenuhi (Waltz 1979).

Selanjutnya, pandangan realisme struktural terbagi ke dalam dua jenis, yaitu realisme defensif dan ofensif, yang didasarkan pada bagaimana sikap negara dalam upaya untuk bertahan diri di sistem internasional yang anarki. Hal utama yang membedakan realisme defensif dengan realisme ofensif adalah peran dari sistem internasional bagi kedua pandangan tersebut, baik sistem tersebut mendorong memaksimalkan keamanannya atau memaksimalkan kekuasaan dan pengaruhnya.

Perbedaan kedua dapat dilihat apakah negara memiliki kecenderungan untuk ekspansi secara berlebihan atau mengisolasi diri. Selanjutnya, perbedaan juga dapat dilihat dari apakah tujuan dan sikap negara didasari oleh keinginan untuk revisionis atau mempertahankan keamanan (Lobell 2017).

Negara umumnya memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi karena agresi dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mencapai keamanan negara. Namun, bagi realisme defensif, sistem internasional dinilai tidak memberikan keuntungan bagi negara untuk melakukan ekspansi melalui agresi. Hal tersebut karena agresi mendorong munculnya *security dilemma* yang membuat negara khawatir akan pengaruh dari intensi dan kekuasaan negara lain terhadap negaranya di masa mendatang (Taliaferro 2000). Lebih lanjut, *security dilemma* dapat memicu respons yang ofensif dari negara lain sehingga menggagalkan upaya negara untuk meningkatkan keamanannya, membuat agresi justru menjadi tidak produktif (Lobell 2017).

Oleh karena itu, negara cenderung fokus pada keamanan dirinya sendiri dibandingkan melakukan kebijakan yang ofensif terhadap negara lain. Dalam hal ini, realisme defensif beranggapan bahwa kebijakan yang moderat merupakan kebijakan yang lebih tepat untuk mencapai keamanan negara. Umumnya, negara akan menerapkan kebijakan yang mengikat melalui ekonomi ataupun diplomasi, dibandingkan dengan militer (Jervis 1978). Jika negara memutuskan untuk melakukan kebijakan yang agresif, keputusan tersebut cenderung dipengaruhi oleh variabel domestik ataupun unit, misalnya dengan adanya persepsi pemimpin (Lobell 2017).

2.2.2 Keseimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)

Perilaku negara dalam hubungan internasional bersumber dari sifat dasar manusia yang berupaya untuk bertahan hidup. Seperti halnya manusia, negara juga memiliki tujuan yang egois, yakni untuk mempertahankan hidupnya dalam sistem internasional yang anarki. Hal tersebut karena dalam sistem yang anarki, tidak ada pemerintahan universal yang berperan dalam mempertahankan jalannya tatanan dan hukum internasional. Dengan kata lain, negara harus bergantung pada dirinya sendiri karena tidak ada aktor lain yang akan membantu ketika negara mengalami kesulitan. Untuk itu, negara pun berupaya untuk memaksimalkan kekuasaan dan kapabilitasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, teori *balance of power* kemudian menjelaskan keberadaan negara dalam sistem *self-help*, dimana tidak ada negara yang dapat membantu negara lain yang lemah atau mencegah suatu negara melakukan hal yang mengancam negara lain untuk mencapai tujuannya (Waltz 1979). Hal itu mendorong negara untuk memiliki kecenderungan meningkatkan kekuasaannya sebesar mungkin. Keinginan negara untuk memperoleh kekuasaan, baik untuk mempertahankan ataupun menggulingkan status quo, yang selanjutnya menciptakan kondisi ²⁵ *balance of power* (Morgenthau, 1973). Teori *balance of power* berangkat dari asumsi bahwa negara merupakan aktor individual yang berupaya untuk mencapai tujuannya. Cara tersebut dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu upaya internal, misalnya dengan meningkatkan kapabilitas militer dan ekonominya, atau upaya eksternal, misalnya dengan membentuk aliansi untuk memperkuat diri atau melemahkan lawan (Waltz, 1979).

Namun, tidak semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam upayanya mencapai kekuasaan yang lebih besar. Kondisi tersebut diperburuk dengan hambatan-hambatan yang mungkin dicapai negara dalam proses mencapai kekuasaan. Oleh karena itu, *balance of power* menjadi salah satu cara untuk memperoleh kekuasaan dalam sistem internasional bagi negara yang memiliki kapabilitas yang tidak seimbang dengan negara lain. Balance of power mencegah negara yang lebih kuat untuk membahayakan atau merugikan negara yang lebih lemah. *Balance of power* juga membantu negara yang lebih lemah untuk mempertahankan keamanannya dengan cara membentuk aliansi dengan negara lain. Adanya keseimbangan kekuasaan membantu negara yang kuat dan lemah untuk hidup bersamaan dan bekerja sama mencapai perdamaian dan kesejahteraan (Morgenthau,1973).

Balance of power bertujuan untuk menjaga stabilitas dari sistem tanpa menghancurkan elemen-elemen yang membentuknya (Waltz,1979). Hal tersebut karena *balance of power* memberikan hambatan bagi kekuasaan negara hanya jika negara mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan cara menerima sistem *balance of power* tersebut sebagai kerangka yang mendasari aktivitasnya. Dengan kata lain, *balance of power* dapat menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas internasional hanya jika negara mengakui *balance of power* tersebut sebagai peraturan kolektif dalam sistem yang ada (Morgenthau ,1973).

29 BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung ,bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian di lakukan. Penelitian ini mencoba menjelaskan Strategi Tiongkok dalam merespon adanya pembentukan Pakta AUKUS.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian penulis terletak pada Strategi Tiongkok Dalam Merespon Pembentukan Pakta AUKUS.

18 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data perantara yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder digunakan karena penulis memperoleh data dari buku, jurnal, dan juga artikel berita yang dapat di akses melalui media internet yang memiliki keterkaitan besar dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berupa mengumpulkan

data-data dari literatur dan informasi melalui membaca literatur atau sumber tertulis seperti buku, penelitian makalah sebelumnya, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian penulis.

²⁰**3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif terkait dengan objek atau peristiwa penelitian yang disajikan dalam bentuk penjelasan. Teknik ini menjelaskan data melalui penelitian sejumlah data yang telah diperoleh penulis tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan melalui sebuah analisis data yang telah dikumpulkan dalam upaya untuk ²³memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya dengan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Selain itu teknik ini bertumpu pada penyebab, penjelasan serta faktor faktor yang melatar belakangi topik yang sedang diteliti. Biasanya pertanyaannya mengarah kepada kenapa dan bagaimana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

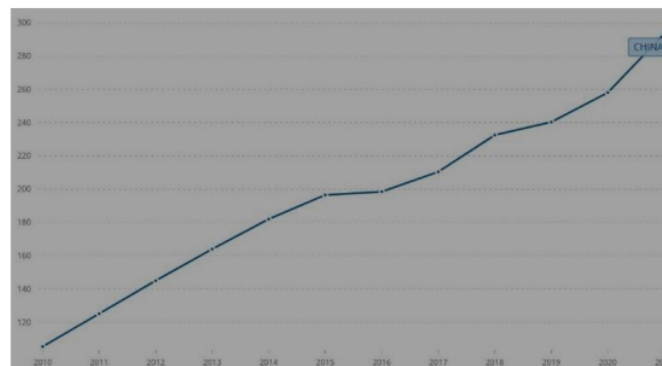
4.1 Pembentukan Pakta AUKUS

Kemaman kawasan Asia-Pasifik didasari oleh ‘kerja sama’ yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan China, dimana *balance of power* di antara kedua negara berkontribusi besar dalam stabilnya domain keamanan di Asia-Pasifik. Untuk menjaga stabilitas kawasan, AS menggunakan kekuatan militer dan pengaruh politiknya untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi di kawasan tersebut atau yang dapat mempengaruhi aliansinya di Asia-Pasifik, sehingga kepentingannya di kawasan tersebut pun tidak terganggu. Di sisi lain, kebijakan Tiongkok ditekankan pada pembangunan nasional yang terfokus pada lingkup internal (Hass, 2020).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, stabilitas kawasan Asia-Pasifik mulai terganggu dengan adanya perubahan sikap dari kedua aktor tersebut, khususnya pada Tiongkok yang mulai melakukan modernisasi dan meningkatkan kapabilitas militernya. Kondisi itu diperburuk dengan sikap AS yang justru secara terang-terangan meningkatkan kerja samanya dengan Taiwan, yang secara tidak langsung menandai penolakan AS terhadap pengaruh Tiongkok di Asia (Hass, 2020). Peningkatan kapabilitas China, yang dinilai mempengaruhi dominasi AS di Asia-Pasifik serta memberikan ancaman bagi negara-negara di sekitarnya, selanjutnya direspons melalui kerja sama pertahanan antara AS, Australia, dan Inggris melalui mekanisme AUKUS. Keputusan itu diambil untuk mempertahankan status quo di kawasan Asia-Pasifik.

Kapabilitas militer Tiongkok saat ini merupakan salah satu dari yang terbaik di dunia. Dengan personel militer mencapai 3,1 juta orang, atau dua kali lipat dibanding personel yang dimiliki oleh AS, Tiongkok menjadi negara dengan militer terbesar di dunia. Kondisi tersebut diikuti pula oleh anggaran militer Tiongkok yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2010, anggaran pengeluaran militer Tiongkok adalah sebesar USD 105,52 miliar, sedangkan pada tahun 2021, nilai tersebut meningkat signifikan menjadi USD 293,35 miliar, menunjukkan bahwa Tiongkok berupaya untuk mengembangkan kapabilitasnya dengan serius.

Gambar 4.1 Peningkatan Pengeluaran Militer Tiongkok Tahun 2010-2021



Sumber: World Bank (n.d.)

Saat ini, angkatan laut Tiongkok merupakan angkatan laut terbesar di dunia, menunjukkan fokus Tiongkok terhadap domain maritim dalam pengembangan kapasitas militernya. Di antara peralatannya, Tiongkok memiliki setidaknya enam kapal selam bertenaga nuklir yang dapat menembakkan rudal dan torpedo (Hawkins, 2023). Di samping itu, Tiongkok juga secara aktif mengembangkan angkatan udaranya yang merupakan angkatan udara terbesar ketiga di dunia.

Teknologi dan inovasi militer yang dikembangkan Tiongkok pun cukup maju, misalnya rudal *hypersonic* Dong Feng yang memiliki ³⁰kecepatan Mach 5 (lima kali lebih cepat dari kecepatan suara) yang dilengkapi dengan bahan peledak ataupun senjata nuklir. Kondisi itu menyebabkan kekhawatiran bagi AS dengan adanya pangkalan angkatan laut AS di Yokosuka, Jepang, yang tidak berjarak jauh dari Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga melakukan ekspansi militer dengan membangun pangkalan militer di berbagai negara lain (Gardner, 2023).

Tiongkok mengembangkan peralatan militernya secara mandiri, dengan tujuan untuk dapat bersaing dan mengimbangi peralatan militer yang diproduksi oleh AS. Dengan demikian, tidak hanya mengembangkan kapabilitas militer negaranya, tetapi Tiongkok juga dapat ikut aktif dalam perdagangan peralatan militer dan senjata ke negara lain, seperti Bangladesh dan Pakistan (Yuan, 2021). Adanya perdagangan senjata tersebut menunjukkan peningkatan hubungan bilateral antara Tiongkok dengan negara-negara lainnya.

Tidak hanya di bidang militer, ancaman Tiongkok juga muncul dari karakter Tiongkok sebagai negara sosialis. Liberalisasi ekonomi Tiongkok dianggap menjadi awal bagi perkembangan demokrasi di negara tersebut yang sejalan dengan pandangan dari negara-negara barat. Namun, ketika Tiongkok sudah berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi mitra perdagangan utama bagi sebagian besar negara di dunia, Tiongkok justru kembali menekankan nilai-nilai sosialis yang dianutnya, dibanding dengan menerapkan demokrasi dan liberalisasi. Sebagai contoh adalah respon Tiongkok yang represif terhadap upaya demokrasi di Hong Kong, ditunjukkan dengan penangkapan

terhadap aktivis-aktivis demokrasi. Tiongkok juga menyatakan akan mengambil alih Taiwan, walaupun dengan cara kekerasan. Kondisi tersebut memberikan ancaman bagi negara-negara demokratis di sekitarnya, termasuk Jepang dan Korea Selatan, karena dikhawatirkan konflik domestik Tiongkok akan menyebabkan *spillover* ke negara-negara tersebut (Gardner, 2023).

AUKUS merupakan pakta kerja sama keamanan yang dilaksanakan oleh AS, Australia, dan Inggris. Ketiga negara mengumumkan kerja samanya dalam AUKUS pada tahun 2021, dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama ketiga negara di bidang keamanan demi menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Hal tersebut karena peningkatan aktivitas luar negeri Tiongkok yang dinilai memberikan ancaman bagi keamanan regional. Oleh karena itu, melalui pakta AUKUS, AS dan Inggris akan memberikan bantuan teknologi untuk pembangunan delapan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia (Wintour, 2021). Dengan demikian, Australia dapat meningkatkan kapabilitas militernya sebagai persiapan jika terjadi situasi serangan dari China.

Tiongkok sendiri memiliki kapabilitas militer yang maju, dimana proyeksi kekuatan militer Tiongkok dinilai dapat mencapai Australia. Beserta AS, Tiongkok merupakan satu-satunya negara yang dapat melakukan serangan langsung terhadap Australia, walaupun jarak di antara kedua negara mencapai lebih dari 4.000 kilometer (Shugart, 2021). Kondisi tersebut, didukung oleh modernisasi militer Australia yang dinilai lamban, mendorong Australia untuk membangun kapal selam baru demi menghadapi ancaman dari Tiongkok. Sebelumnya, Australia memiliki perjanjian kerja sama dengan Perancis untuk

memproduksi dua belas kapal selam baru senilai USD 66 miliar yang diperkirakan dapat digunakan pada tahun 2054 (Cheng, 2022). Namun, pada tahun tersebut, kapal buatan Perancis itu dinilai sudah tidak lagi relevan, terlebih Tiongkok mengumumkan akan mengeluarkan kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi baru pada tahun 2040 (Mole, 2021). Menanggapi hal tersebut, Australia pun membatalkan perjanjian kerja samanya dengan Perancis dan beralih pada pakta kerja sama AUKUS.

Kapal selam buatan AS dan Inggris dinilai memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan buatan Perancis. Melalui AUKUS, Australia berencana untuk membeli tiga hingga lima kapal selam bertenaga nuklir dari AS dan meningkatkan kerja sama pengembangan kapal selam bertenaga nuklir bersama dengan AS dan Inggris. Pada tahun 2023, personel angkatan laut Australia mengunjungi pangkalan militer AS dan Inggris untuk mempelajari tentang pengoperasian kapal selam bertenaga nuklir. Di samping itu, Australia juga mulai bekerja sama dengan Inggris untuk mengembangkan kapal permukaan bertenaga nuklir yang disebut sebagai SSN-Aukus (Hawkins, 2023).

Tidak hanya itu, AUKUS juga membahas tentang kerja sama pengembangan teknologi lain, seperti peledak strategis, rudal *hypersonic*, dan lain-lain (Grossman, 2023). Dengan begitu, tidak hanya memperluas kerja sama keamanan, pakta AUKUS juga membantu Australia untuk meningkatkan kapabilitas militernya dengan lebih maksimal. Di samping itu, kerja sama dengan negara-negara besar juga mendukung ekspansi pengaruh dari Australia di kawasan Asia-Pasifik. Terlebih dengan keikutsertaan AS dan Inggris, Australia

pun secara tidak langsung mendapatkan jaminan keamanan dari kedua negara tersebut, karena negara lain pun akan cenderung menghindari konflik dengan negara-negara tersebut (Wilkins, 2021).

Di sisi lain, bagi AS, AUKUS dapat dilihat sebagai upaya yang dilakukan AS untuk mempertahankan hegemoninya, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Oleh karena itu, melalui AUKUS, AS bertujuan untuk meningkatkan kekuatan maritimnya dengan mempertahankan akses terhadap perairan yang terbuka dan bebas untuk mempermudah mobilisasi personel militer AS, terlebih karena posisi geografis AS yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selain itu, kerja sama antara AS dengan negara yang letak geografisnya jauh, seperti Australia, justru memberikan pengaruh lebih besar bagi AS karena secara tidak langsung AS dapat memproyeksikan kekuatan militernya di kawasan Australia pula (Cheng, 2022).

Bagi Inggris, keterlibatan Inggris dapat dilihat sebagai upaya untuk merealisasikan kepentingan Inggris di Indo-Pasifik pasca Brexit. Hal itu juga untuk mendukung AS sebagai mitra terdekat Inggris. Inggris ingin menunjukkan pada AS bahwa Inggris merupakan mitra yang dapat diandalkan, khususnya dalam tujuan AS untuk menghambat ekspansi pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (Wright, 2021). Inggris sendiri menyatakan bahwa Tiongkok telah menunjukkan hambatan bagi tatanan internasional yang layak, baik dalam bentuk hambatan keamanan ataupun nilai dan norma. Oleh karena itu, Inggris ingin meningkatkan

keamanan nasionalnya dari Tiongkok, sembari mencapai kepentingannya untuk meningkatkan presensi di Indo-Pasifik (Hawkins, 2023).

Walaupun AUKUS tidak secara langsung menyebutkan tentang Tiongkok, tetapi Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kerja sama AUKUS dengan konflik yang mungkin terjadi dalam sengketa wilayah Taiwan. Hal itu menunjukkan kekhawatiran negara-negara anggota AUKUS terhadap kemungkinan terjadinya konflik dengan Tiongkok terkait Taiwan. Dalam skenario konflik antara Tiongkok dengan AS terkait Taiwan, Inggris dan Australia sebagai negara AUKUS memiliki komitmen untuk membantu AS dalam konflik tersebut. Meskipun Wakil PM Marles menyatakan bahwa Australia tidak memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam konflik, bergabungnya Australia dengan AUKUS menunjukkan komitmen tidak langsung dari negara tersebut. Hal itu karena baik AS ataupun Inggris tidak mungkin memberikan bantuan pengembangan peralatan militer secara cuma-cuma. Dengan kata lain, negara pasti berharap bantuan tersebut dapat membantunya di masa mendatang. Jika tidak, kerja sama melalui AUKUS tidak menjadi penting bagi AS.

4.2 Tiongkok Sebagai Kekuatan Global Baru

Negara *great power* adalah negara yang mempunyai karakteristik yaitu kekuatan militer dan ekonomi yang maju, mempunyai pengaruh diplomatik dan budaya yang dapat mempengaruhi *small power* untuk mempertimbangkan pendapat *great power* sebelum mengambil tindakan. Banyak pengamat hubungan internasional yang berpendapat bahwa negara Tiongkok masuk dalam salah satu

2 Negara great power. Perkembangan pesat yang dilakukan oleh Tiongkok telah menarik perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir. Implikasi kebangkitan Tiongkok terlihat dari berbagai bidang diantaranya dari perluasan pengaruhnya dan militer.

2 Tujuan utama bagi setiap negara terutama *great power* adalah untuk mempertahankan eksistensi dirinya (survival). Tiongkok merupakan salah satu negara great power yang memiliki potensi untuk menjadi hegemon di kawasan Asia dan juga dunia. Sebagai negara great power, yang dilakukan Tiongkok adalah untuk bisa bertahan dalam sistem internasional yang anarki dan membantu dirinya sendiri agar tidak menjadi korban dari agresi negara lain.

Dalam beberapa dekade terakhir, salah satu negara dengan perkembangan yang paling pesat dalam politik global adalah Tiongkok. Peningkatan pengaruh Tiongkok dalam lingkup internasional dimulai sejak bergabungnya negara tersebut dalam *World Trade Organization* (WTO) pada akhir tahun 2001 (WPR, 2023). Dengan keterlibatan Tiongkok dalam WTO, Tiongkok tidak hanya memperluas pasarnya yang semula terbatas tanpa kontribusi WTO, tetapi negara tersebut juga perlahan berhasil mempengaruhi rantai pasokan global. Dengan demikian, Tiongkok pun mampu menjadi salah satu mitra utama bagi negara-negara lain di bidang ekonomi, membuatnya secara tidak langsung memiliki pengaruh dalam politik internasional, khususnya bagi negara-negara ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada ekonomi Tiongkok.

Pertumbuhan Tiongkok sebagai kekuatan global baru dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, Tiongkok mampu memanfaatkan situasi kolonialisme yang

dialaminya sebelumnya untuk memperluas jaringan kerja sama, khususnya dalam ekonomi. Kota-kota pusat ekonomi Tiongkok, seperti Hong Kong dan Macau, sebelumnya berada di bawah kekuasaan Eropa. Namun, kondisi tersebut justru membuat Tiongkok mampu secara tidak langsung terlibat dalam ekonomi global melalui kerja sama dengan negara-negara koloninya, sebelum akhirnya Tiongkok masuk ke dalam ekonomi internasional sebagai aktor independen. Sebagai contoh, Tiongkok menggunakan Macau sebagai tempat untuk menyelundupkan barang-barang dari luar negeri ke Tiongkok daratan. Di samping itu, Hong Kong, yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris hingga tahun 1997, juga menjadi pusat mata uang asing Tiongkok. Dengan memiliki pasokan mata uang asing yang besar, Tiongkok pun mampu mengimpor teknologi melalui Hong Kong, untuk kemudian digunakan dalam proses pembangunannya (Smith, 2019).

Kedua, Tiongkok mampu memanfaatkan karakter sosialis yang kuat dari negaranya dan memproyeksikan karakter tersebut ke dalam kebijakan untuk pembangunan ekonomi nasional. Karakter itu juga membuat sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Tiongkok, dengan anggapan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama. Tiongkok pun mengirimkan lebih dari 300 juta tenaga kerja dari wilayah pinggiran atau pedesaan ke kota untuk bekerja di sektor ekspor. Keterbelakangan yang dialami masyarakat Tiongkok sebelumnya membuat upah tenaga kerja di Tiongkok cukup rendah, yang selanjutnya membawa keuntungan bagi pembangunan di Tiongkok (Smith, 2019).

Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan global baru salah satunya ditandai dengan peningkatan aktivitas dan peran negara tersebut dalam organisasi internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2006, Margaret Chan dipilih sebagai direktur jenderal dari *World Health Organization* (WHO), dimana pada masa jabatannya, Chan berupaya untuk mendukung kepentingan nasional Tiongkok, yaitu dengan mendorong adaptasi resmi obat-obatan tradisional Tiongkok. Kepemimpinan Chan mengawali dominasi Tiongkok dalam organisasi internasional yang semula dikuasai oleh negara-negara Barat. Pada tahun 2019, Wakil Menteri Pertanian dan Pedesaan Qu Dongyu terpilih menjadi direktur jenderal dari UN Food and Agriculture Organization (FAO), mengalahkan kandidat lain yang didukung oleh Amerika Serikat. Hingga saat ini, empat dari 15 organisasi milik PBB dikepalai oleh Tiongkok(CFR, n.d.).

Tiongkok juga membuat institusi alternatif yang walaupun terpusat pada Tiongkok, tetapi dinilai memiliki mekanisme yang lebih mudah jika dibandingkan dengan institusi berbasis kebaratan. Salah satu alternatif tersebut adalah dengan dirilisnya *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan tujuan untuk memberikan bantuan dana bagi proyek pembangunan infrastruktur global dan mempererat kerja sama dengan negara lain. Tiongkok juga membentuk organisasi multilateralnya sendiri, misalnya *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) pada tahun 2010. SCO melibatkan Tiongkok, Rusia, serta negara-negara Asia Tengah lainnya. Selanjutnya, SCO berperan sebagai instrumen bagi Tiongkok untuk menentang norma global yang sebelumnya diterapkan, misalnya dengan penerapan internet

yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah, dibanding penerapan internet terbuka seperti yang selama ini digunakan (CFR, n.d.).

Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok sejak tahun 1978 mendorong Tiongkok menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat hingga saat ini. Semula, pada tahun 1987, Tiongkok hanya memiliki porsi sebesar 1,618% dari total ekonomi global (Gat, 2008). Namun, pada tahun 2022, perekonomian Tiongkok mencapai 16,7% dari total ekonomi global. Pada tahun 1995, Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedelapan di dunia, dengan GDP sebesar USD 736,87 miliar. Perekonomian Tiongkok pun perlahan meningkat hingga pada tahun 2005, Tiongkok menempati urutan kelima ekonomi terbesar di dunia dengan nilai GDP mencapai USD 2,3 triliun. Saat ini, perekonomian Tiongkok merupakan yang terbesar kedua, setelah Amerika Serikat, dengan nilai GDP mencapai USD 14,7 triliun (Silver, 2022). Kondisi itu menunjukkan bahwa Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar saat ini.

Besarnya perekonomian Tiongkok turut berpengaruh terhadap peran Tiongkok dalam politik global. Hal itu ditunjukkan dengan sikap Tiongkok yang dinilai semakin tegas dalam hubungannya dengan negara lain, khususnya Amerika Serikat, ataupun dalam mekanisme institusi internasional. Pada tahun 2009, Tiongkok mengkritik penggunaan dollar AS sebagai mata uang tunggal dalam aktivitas ekonomi internasional. Lebih lanjut, Kepala Bank of Tiongkok Zhou Xiaochuan mengajukan renminbi, yaitu mata uang Tiongkok, sebagai salah satu mata uang utama dalam transaksi internasional. Tiongkok berhasil mencapai tujuan

tersebut pada tahun 2015, membuat pengaruh Tiongkok dalam ekonomi global pun meningkat (Zhao, 2016). Hal tersebut bersamaan dengan penurunan dominasi dollar AS yang menjadi kunci utama bagi pengaruh Amerika Serikat dalam lingkup internasional.

Pada tahun 2010, Tiongkok juga mengajukan perubahan bagian dalam pemungutan suara di *International Monetary Fund* (IMF) berdasarkan kekuatan ekonomi masing-masing negara. Menanggapi hal tersebut, IMF pun berencana meningkatkan bagian suara Tiongkok, yang semula memiliki porsi 4%, menjadi 6%. Perubahan tersebut diratifikasi oleh seluruh anggota G-20, tetapi tidak disetujui oleh Kongres Amerika Serikat hingga tahun 2015 (Zhao, 2016). Dalam hal ini, Tiongkok beranggapan bahwa Tiongkok membutuhkan sumber daya lebih besar untuk pertumbuhannya, dan di sisi lain, Tiongkok mau berkontribusi dalam skala besar untuk pembangunan di negara-negara lain. Namun, kondisi itu mendapatkan penolakan dari pemerintah Amerika Serikat (Dollar, 2015). Sebagai respons, pada tahun 2014, Tiongkok pun membentuk Bank BRICS bersama dengan negara-negara ekonomi baru lainnya dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme serupa IMF, tetapi dalam lingkup yang lebih kecil (Zhao, 2016).

Tiongkok berupaya untuk meningkatkan kepemimpinannya, baik dalam lingkup regional ataupun internasional, melalui implementasi berbagai inisiatif baru. Salah satu inisiatif terbesar Tiongkok adalah *One Belt One Road* (OBOR) yang dikeluarkan pada tahun 2015. Saat ini, OBOR lebih dikenal sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI). BRI sendiri terdiri dari 65 negara dengan lebih dari 900 proyek pembangunan senilai USD 850 miliar (Sarker, et al., 2018). BRI merupakan

salah satu proyek kerja sama terbesar yang meliputi dua pertiga dari populasi global dan tiga perempat dari sumber daya energi (Wolff, 2016). Dengan demikian, BRI dilihat sebagai mekanisme kerja sama terbesar yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global melalui kerja sama ekonomi.

Implementasi inisiatif BRI ditujukan untuk menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melalui peningkatan kerja sama antar negara anggota yang direalisasikan melalui proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya ataupun rel kereta api (Ramasamy, et al., 2012). Walaupun dianggap sebagai kerja sama ekonomi, studi menyatakan bahwa BRI bertujuan untuk membentuk tatanan politik dan ekonomi, khususnya di Asia, dengan menciptakan jaringan kerja sama perdagangan, politik, dan budaya. Bahkan, Presiden Xi Jinping pun menyatakan bahwa tujuan utama dari BRI adalah untuk mengubah sistem internasional agar sejalan dengan kepentingan Tiongkok dan menjadikan Tiongkok sebagai pusat dunia (Zhao, 2016).

Untuk mendukung implementasi ¹⁹ BRI, Tiongkok membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* pada tahun 2015. AIIB dianggap sebagai alternatif bagi Bank Dunia dan institusi-institusi pembangunan global lainnya. AIIB diikuti oleh 49 negara selain Tiongkok. Bahkan, negara-negara mitra dekat Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, dan Korea Selatan, pun termasuk sebagai negara anggota AIIB. Bergabungnya negara-negara Eropa dalam AIIB menunjukkan validasi yang kuat akan pertumbuhan pengaruh Tiongkok dan kemunculan Tiongkok sebagai global power baru. Di sisi lain, Tiongkok juga berupaya untuk mengisi kekurangan dalam sistem *Bretton Woods* yang dibuat oleh

Amerika Serikat, yang dinilai merugikan banyak negara. Oleh karena itu, dibentuklah AIIB dengan tujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ada, menyediakan barang publik, dan berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan internasional (Zhao, 2016).

Pada awal pembentukannya, AIIB berhasil mengumpulkan modal sebesar USD 100 miliar untuk mendukung pelaksanaan BRI, dimana dana tersebut difokuskan untuk pembangunan konstruksi dan infrastruktur (Sarker, et al., 2018). Selain AIIB, bank lokal Tiongkok seperti *China Development Bank* dan *Export-Import Bank of China* juga berkomitmen untuk memberikan bantuan dana bagi proyek inisiatif BRI, dengan nilai total mencapai 380 miliar RMB (He, 2017). Keaktifan Tiongkok dalam inisiatif BRI berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur global, yang kemudian memperluas pengaruh Tiongkok di negara-negara anggota BRI. Di samping itu, Tiongkok mendapatkan keuntungan geopolitik dari pemanfaatan sumber daya di wilayah tertentu yang sebelumnya tidak dikembangkan dengan maksimal. Tiongkok juga menjadi pemasok utama dari barang-barang manufaktur bagi negara lain, dan sebaliknya, menjadi importir produk agrikultur dari luar negeri (Andrea, 2014). Hal ini tidak hanya meningkatkan pengaruh Tiongkok sebagai kekuatan global baru, khususnya terhadap negara-negara dengan ekonomi berkembang, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan nasional Tiongkok.

Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan global baru berkaitan dengan upaya negara tersebut untuk menjadi hegemon dalam lingkup regional (Sullivan & Brands, 2020). Hal tersebut karena dengan memiliki kawasan yang aman bagi

kepentingan Tiongkok, Tiongkok dapat memproyeksikan kekuatannya di lingkup global. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tiongkok pun meningkatkan kapabilitas militer dan politiknya dengan tujuan mengurangi pengaruh Amerika Serikat, khususnya di kawasan Asia yang secara geografis berdampingan langsung dengan Tiongkok. Dalam praktiknya, Tiongkok melakukan investasi skala besar bagi pengembangan kapabilitas militernya, mulai dari pesawat tempur, kapal selam, hingga teknologi *anti-access/area-denial* (A2AD) untuk mencegah intervensi militer dari Amerika Serikat, sehingga Tiongkok dapat lebih leluasa memproyeksikan kekuatan militernya di kawasan sekitarnya. Hal ini berkaitan pula dengan tujuan Tiongkok untuk mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Timur sebagai bagian dari negaranya (Sullivan & Brands, 2020).

Saat ini, Tiongkok merupakan negara dengan kapasitas militer terbesar di dunia, dengan anggaran militer sebesar USD 219 miliar pada tahun 2022, atau dua kali lebih banyak dibandingkan dengan anggaran militer Tiongkok pada tahun 2012. Dengan peningkatan anggaran yang signifikan, Tiongkok dianggap sebagai negara dengan modernisasi militer terbesar sejak Perang Dingin. Pada sektor angkatan laut, Tiongkok merupakan angkatan laut terbesar, mengalahkan Amerika Serikat, jika dilihat dari jumlah kapal yang dimiliki. Pada sektor angkatan udara pun, kapabilitas Tiongkok merupakan terbesar ketiga di dunia dan dinilai perlahan memiliki kualitas yang sama dengan negara-negara barat (Schuman, 2023).

Peningkatan kekuatan militer Tiongkok mendorong Tiongkok untuk bersikap lebih agresif, khususnya di wilayah sekitar negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan klaim '*Nine Dash Line*' yang dilakukan oleh Tiongkok untuk

menentukan batas wilayah maritim berdasarkan aspek sejarah yang diakui oleh Tiongkok. Mendukung klaim tersebut, Tiongkok menolak untuk terlibat dalam penyelesaian kasus di Mahkamah Internasional terkait perbatasan wilayah. Padahal, klaim Tiongkok melalui *Nine Dash Line* dinilai telah melanggar *UN Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) terkait kebebasan navigasi di domain maritim (Zhao, 2016).

Selain itu, Tiongkok juga meningkatkan aktivitas militernya di kawasan maritim Asia Timur, khususnya di wilayah sekitar Taiwan. Walaupun tidak memproyeksikan kekuatan militernya dalam lingkup global, Tiongkok memiliki militer yang kuat jika dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitarnya. Kondisi tersebut, bersamaan dengan minimnya komitmen Amerika Serikat dalam bidang pertahanan di Asia ditandai dengan sedikitnya jumlah personel militer yang dikerahkan Amerika Serikat di Asia menjadi salah satu faktor tumbuhnya pengaruh Tiongkok sebagai kekuatan baru. Bahkan, Amerika Serikat telah menunjukkan penurunan upaya militer bagi aliansi-aliansinya di Asia, yang selanjutnya memberi ruang bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya. Secara tidak langsung, perubahan *balance of power* pun dapat terjadi dalam kondisi tersebut (Schuman, 2023).

4.3 Respon Tiongkok Terhadap Pembentukan Pakta AUKUS

Untuk menjawab rumusan masalah penulis Bagaimana Strategi Tiongkok Dalam Merespon Pembentukan Pakta AUKUS Pada Tahun 2021, Maka penulis mencoba menjelaskan sebagai berikut. Kehadiran AUKUS sebagai wadah

kerjasama baru di bidang keamanan tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada tahun 2021 telah menimbulkan berbagai reaksi di dunia internasional. Berbagai reaksi dari pro dan kontra pun membuat isu AUKUS menjadi sorotan topik penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat internasional. Salah satu yang paling menentang kehadiran AUKUS sebagai akronim dari kerja sama pertahanan dan keamanan, yakni Tiongkok.

Tiongkok, menanggapi perjanjian trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, melakukan *Speech Act* seperti kritik terbuka untuk menekankan bahwa perjanjian AUKUS berbahaya bagi banyak pihak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan keras Tiongkok yang menilai bahwa kesepakatan ketiga negara tersebut merupakan model baru provokasi Barat. Tiongkok sendiri menilai AUKUS dapat menjadi ancaman bagi keamanan kawasan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

AUKUS sendiri merupakan bentuk kesepakatan trilateral untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Namun, bagi Tiongkok, hal ini akan mengganggu stabilitas kawasan dan merusak perdamaian kawasan. Lijian Zhao, juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, menekankan bahwa perjanjian tersebut dapat memicu perlombaan senjata karena tindakan AUKUS dapat merusak prinsip nonproliferasi internasional. Lebih lanjut, Zhao menganggap upaya Amerika Serikat dan sekutunya sebagai tindakan standar ganda yang tidak bertanggung jawab karena menggunakan ekspor penggunaan nuklir sebagai bagian dari rencana permainan geopolitik (Shinkman, 2021).

Perbedaan asumsi mengenai tujuan pendirian AUKUS secara trilateral perjanjian kerjasama pengembangan alih teknologi kapal bertenaga nuklir telah memicu persaingan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dengan Tiongkok sebagai pihak yang paling menentang pakta AUKUS. Bagi pihak AUKUS, seperti yang disampaikan oleh Peter Dutton selaku Menteri Pertahanan Australia menilai kritikan Tiongkok terhadap perjanjian AUKUS merupakan tindakan yang tidak rasional. Lebih lanjut, Dutton menjelaskan bahwa terdapat argumen yang tidak rasional ketika Tiongkok menilai AUKUS akan menyebabkan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik padahal Tiongkok telah memiliki 335 armada kapal dan berupaya untuk terus meningkatkan armadanya menjadi 400 dalam waktu dekat (Hurst, 2021).

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Wang Xining selaku duta besar Tiongkok untuk Australia dengan mengingatkan agar pemerintah Australia tidak boleh terobsesi dengan mentalitas perang dingin prasangka ideologis. Lebih-lebih lagi, Wang menyatakan bahwa pejabat Australia seharusnya tidak memberikan argumen yang dapat memicu konfrontasi dengan Tiongkok dengan mencari keuntungan politik yang egois karena pada akhirnya hanya akan merugikan Australia dan menjadi bahan tertawaan masyarakat internasional (Sky News Australia, 2021).

Menghadapi kontra-reaksi dari masyarakat internasional, pihak AUKUS lainnya seperti Inggris juga melalui Perdana Menteri Boris Johnson menilai AUKUS tidak dilihat secara luas sebagai upaya untuk memusuhi Tiongkok. Namun, lebih dilihat sebagai kemitraan transfer teknologi dalam membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk tujuan damai dan menjaga stabilitas kawasan (BBC,

2021). Inggris juga memandang keterlibatannya dengan pakta AUKUS akan menjadi langkah geostrategis baru setelah momentum Brexit.

Sementara itu, Amerika Serikat di era kepemimpinan Biden menegaskan bahwa fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak hanya terfokus pada kepentingan nasional tetapi juga fokus pada komitmen dan upaya bersama dalam menghadapi tantangan global, khususnya dalam hal keamanan internasional. Hal ini dibuktikan dengan upaya Amerika Serikat dalam membangun AUKUS bersama kedua negara sekutunya dengan menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai langkah awal dalam membangun komitmen bersama. Dalam hal ini, Visi Amerika Serikat mengenai kawasan Indo-Pasifik cenderung mengutamakan pengelolaan aliansi dan kemitraannya. Kehadiran AUKUS juga dapat dilihat sebagai bentuk penekanan Amerika Serikat dan aliansinya terhadap dominasi Tiongkok di kawasan Indo Pasifik.

Kawasan Indo-Pasifik dianggap sebagai bagian dari persaingan yang tegang antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta sekutunya. Kawasan tersebut juga bisa dikatakan sebagai arena pertarungan perebutan pengaruh bagi dua negara adidaya saat ini, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, Tiongkok dipandang memiliki sedikit keuntungan atas pengaruhnya di kawasan tersebut dibandingkan Amerika Serikat.

Tiongkok dikenal sebagai negara yang dapat menawarkan bantuan ekonomi yang dapat diterima oleh negara-negara Indo-Pasifik. Sementara itu, Amerika Serikat dinilai agak terlambat menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai bagian dari

kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat sendiri memandang bahwa fokus utamanya adalah kekhawatirannya terhadap koersif dan agresif Tiongkok yang semakin masif tindakan di daerah. Namun, beberapa negara Indo-Pasifik lebih fokus pada kekhawatiran tentang ancaman langsung yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Negara-negara tersebut hanya tertarik pada hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat tetapi tidak tertarik pada kerja sama strategis geopolitik Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dikarenakan beberapa negara di kawasan tidak ingin melihat Tiongkok sebagai musuh bersama (Staf Al Jazeera, 2022).

Ketegangan rivalitas di kawasan Indo-Pasifik antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, tidak terlepas dari perbedaan pandangan terhadap kawasan tersebut. Bagi Tiongkok, Tiongkok memandang kawasan IndoPasifik sebagai bagian dari rencananya untuk membangun infrastruktur kawasan dengan menerapkan model BRI (Belt and Road Initiative) untuk memberikan kontribusi positif bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Amerika Serikat memandang kawasan ini lebih cenderung fokus pada komponen militer melalui konsep dan strategi geopolitiknya.

Bahkan pandangan itu didasarkan pada konsep “koordinasi kekuatan-kekuatan besar” dengan mengesampingkan kehadiran Tiongkok. Tiongkok sendiri menilai konsep yang ditawarkan Washington dapat merusak prinsip keterbukaan dan non-eksklusivitas di kawasan Indo-Pasifik. Lebih-lebih lagi, Tiongkok memandang sudut pandang Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah program kebijakan luar negeri yang diprakarsai oleh Tiongkok, yaitu BRI. Bahkan

Tiongkok menuding model yang ditawarkan Amerika Serikat hanya akan mengganggu konsep kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Bagi Tiongkok, kecenderungan Amerika Serikat terhadap konstruksi geopolitik baru dengan komponen militer merupakan upaya Washington untuk menciptakan mentalitas perang dingin baru di kawasan Indo-Pasifik (Denisov et al., 2021).

Tiongkok juga secara masif melakukan *speech act* melalui kampanye ke dunia internasional masyarakat tentang bahaya aliansi AUKUS. Hal ini terlihat dari upaya Tiongkok yang menuduh perjanjian AUKUS melanggar NPT (*Non-Proliferation of Nuclear Weapons*) karena akan melakukan transfer senjata nuklir secara ilegal selama pertemuannya dengan dewan IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Tiongkok juga memandang aliansi AUKUS berusaha membujuk IAEA untuk menghapuskan proliferasi nuklir. Bahkan Tiongkok mulai meragukan dan mempertanyakan legitimasi, integrasi, dan mandat IAEA dalam menyelesaikan isu bahan nuklir untuk perjanjian AUKUS (Murphy, 2022).

4.3.1 Modernisasi Militer Tiongkok Menyikapi Kehadiran AUKUS

Kehadiran pakta AUKUS kini menjadi ancaman serius bagi ²² negara-negara di sekitar kawasan Indo-Pasifik, khususnya Tiongkok. Tiongkok menyadari bahwa pakta keamanan yang diprakarsai Australia, Inggris, dan Amerika Serikat akan menjadi masalah serius di masa depan karena pengaruh dominasi Tiongkok, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Hal itu juga kini memaksa Tiongkok untuk menyiapkan strategi penting dalam menghadapi ancaman AUKUS. Beberapa hal

yang dianggap Tiongkok sebagai strategi adalah terkait peningkatan kapasitas militer dan tindak tutur berupa kritik terhadap pakta trilateral.

Secara garis besar ada beberapa faktor pendukung mengapa Tiongkok mulai melakukan modernisasi militer yang pertama yaitu dari segi strategi dan cara pandang yang komprehensif, Tiongkok memandang bahwa modernisasi kekuatan militer bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan stabilitas keamanan kawasan dari ancaman negara lain. Sementara itu, secara historis dan teoretis, kehadiran teknologi dan informasi perang modern turut mempengaruhi perubahan karakteristik militer di dunia internasional. Tindakan memodernisasi kekuatan militer sangat penting mengingat ketidakpastian keamanan internasional yang dinamis akibat meningkatnya ancaman yang kompleks. Hal ini menyadarkan Tiongkok bahwa masalah pertahanan negara merupakan hal yang penting untuk terus diperhatikan oleh negara (Amin, 2019).

Kehadiran teknologi dan informasi perang modern juga mempengaruhi perubahan karakteristik militer di dunia internasional. Tindakan memodernisasi kekuatan militer sangat penting mengingat ketidakpastian keamanan internasional yang dinamis akibat meningkatnya ancaman yang kompleks. Hal ini menyadarkan Tiongkok bahwa masalah pertahanan negara merupakan hal yang penting untuk terus diperhatikan oleh negara (Amin, 2019). Kehadiran teknologi dan informasi perang modern juga mempengaruhi perubahan karakteristik militer di dunia internasional. Tindakan memodernisasi kekuatan militer sangat penting mengingat ketidakpastian keamanan internasional yang dinamis akibat meningkatnya ancaman yang kompleks. Hal ini menyadarkan Tiongkok bahwa masalah

pertahanan negara merupakan hal yang penting untuk terus diperhatikan oleh negara (Amin, 2019).

Dalam hal peningkatan kapasitas militer, Tiongkok telah memodernisasi angkatan bersenjata yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Hal ini terlihat dari peningkatan kemampuan armada kapal perang dan armada kapal selam. Armada tersebut memiliki kemampuan tenaga nuklir yang dilengkapi dengan rudal balistik. Dalam program peningkatan modernisasi angkatan bersenjata, Tiongkok juga telah meningkatkan kemampuan angkatan lautnya untuk menjangkau wilayah laut dalam dan pesisir (Gertz, 2017).

Hal ini juga didukung oleh upaya Tiongkok untuk menerapkan doktrin perang gaya baru dalam proses modernisasi militer. Dalam hal ini, doktrin tentang gaya perang baru mengedepankan strategi perang dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dan informasi. Hal ini dimaksudkan agar kemampuan militer Tiongkok dapat memanfaatkan serangan yang lebih efektif untuk mengefisienkan waktu dalam kondisi perang. Doktrin ini juga menjelaskan dalam implementasi format perang di era modern bahwa mereka yang memiliki penguasaan teknologi senjata modern dan jangkauan yang lebih efisien akan memberikan efek destruktif yang lebih berbahaya sehingga perang akan cepat berakhir (Cordesman & Yarosh, 2013).

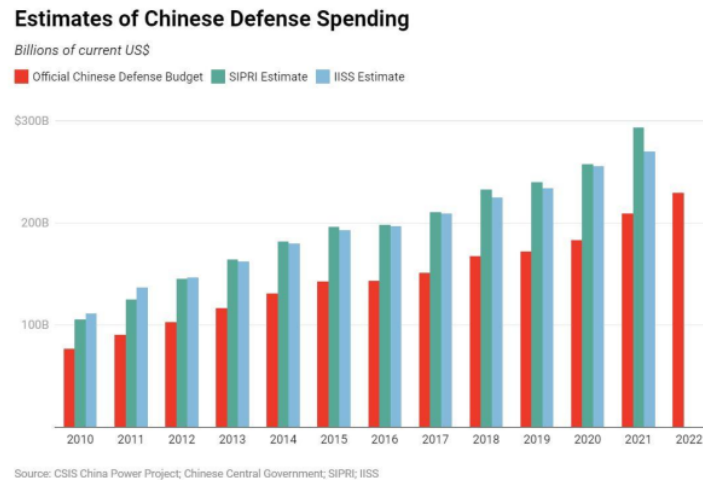
Modernisasi militer yang dilakukan Tiongkok merupakan bukti nyata keinginan besar Tiongkok untuk mencapai status negara adidaya. Salah satu tahapan awal yang menjadi faktor pendukung untuk mencapai hal tersebut adalah

kekuatan maritim. Dalam hal ini, Tiongkok memahami bahwa kekuatan suatu negara maritim tidak hanya dilihat dari kekuatan armada angkatan laut yang kuat tetapi juga membutuhkan infrastruktur militer dan logistik yang kuat seperti kapal *coast guard* yang memiliki kemampuan unggul, angkatan laut yang kuat, armada kapal dagang yang besar dan industri militer kelas dunia.

Bagi Tiongkok, hal ini bertujuan untuk mencegah ancaman eksternal yang akan dihadapi Beijing, terutama ketika terjadi perselisihan dengan negara lain. Selain itu, modernisasi militer besar-besaran Tiongkok adalah pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat internasional bahwa Tiongkok mulai mempersiapkan diri sebagai negara adidaya maritim. Hal ini juga didukung oleh aktivitas militer Tiongkok dengan melakukan latihan bersama dengan Rusia di laut Baltik serta aktivitas kapal perang dan kapal intelijen Tiongkok yang mulai beroperasi di pesisir Queensland dan Djibouti (Cipto, 2018).

Tiongkok di era Xi Jinping ³⁸ memiliki ambisi untuk menjadi negara dengan kekuatan maritim terbaik di dunia. Hal ini dinilai penting bagi Tiongkok karena proyeksi di laut memiliki potensi penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di dunia luar. Hal ini juga didukung oleh peran pemerintah dalam program Jalur Sutra Maritim sebagai bagian dari instrumen kekuatan maritim Tiongkok. Ketergantungan negara pada perdagangan, seperti ekspor bahan mentah dan bahan bakar ekonomi, telah menjadi peluang geostrategis bagi Tiongkok untuk menjadi "komandan lautan" dalam memastikan aliran pelayaran yang stabil melalui rute maritim (Khan et al., 2019).

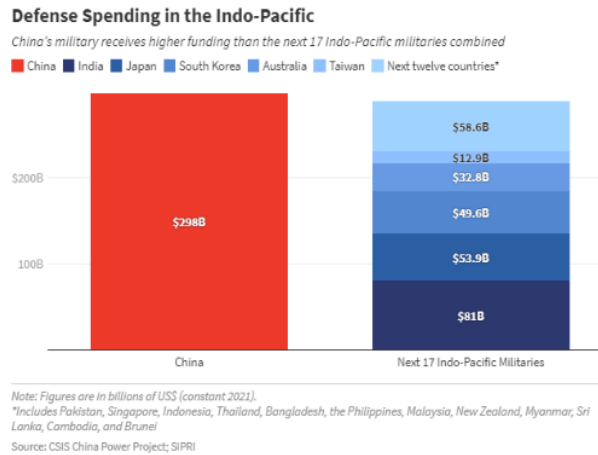
Gambar 4.3.1 Estimasi Pengeluaran Sektor Pertahanan China



Sumber: CSIS (n.d.)

Pada tahun 2022, pembukaan sesi tahunan Kongres Rakyat Tiongkok(NPC) telah menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah secara resmi mengumumkan peningkatan pengeluaran pertahanan negara sebesar 7,1% untuk 1,45 triliun yuan atau setara dengan \$230 miliar dalam rancangan laporan. anggaran negara. Angka ini dinilai realistis bagi Beijing untuk terus mendukung program modernisasi militernya. Bahkan di tengah ketidakpastian situasi keamanan di sekitar Tiongkok, peningkatan belanja pertahanan pada tahun 2022 telah melampaui anggaran belanja pertahanan pada tahun 2020 dengan angka sekitar 6,6% dan pada tahun 2021 dengan angka sekitar 6,8%. Pemerintah Tiongkok diperkirakan akan membuat langkah besar pada tahun 2022 dengan meningkatkan pelatihan tempur dan kesiapan logistik militer untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan Tiongkok(Xuanzun, 2022).

Gambar 4.3.2 Perbandingan Anggaran Pertahanan Tiongkok vs Negara-Negara di Kawasan Indo-Pasifik



Sumber : CSIS (n.d)

Data yang dikutip dari *CSIS China Power Project* telah menunjukkan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok. Tindakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan anggaran pertahanan merupakan respons untuk mendukung modernisasi militer. Hal ini dinilai penting dalam mencegah intervensi asing dalam isu keamanan regional dan internasional, terutama mengenai kedaulatan negara. Selain itu, peningkatan anggaran pertahanan juga didukung oleh beberapa program modernisasi militer lainnya seperti program pengadaan, reformasi militer, hingga program perubahan doktrinal baru terkait strategi perang *People's Liberation Army* (PLA). Dalam perkembangannya, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok dalam dua dekade terakhir belum mampu menandingi Amerika Serikat yang telah menghabiskan \$767,8 miliar atau hampir tiga kali lipat

anggaran Beijing pada tahun 2021. Ini juga menunjukkan bahwa ada kepentingan yang berbeda dalam militer untuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Perbedaan kepentingan tersebut dapat dilihat dari pola Amerika Serikat yang lebih cenderung mempertahankan status negara adidaya atas kemampuan militer secara global. Sementara itu, Tiongkok berfokus pada keamanan regional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik (ChinaPower, 2022).

Tindakan Tiongkok dalam melakukan modernisasi militer tidak terlepas dari tiga tujuan utama, yaitu pertama, mengembangkan militer yang memiliki kemampuan unggul dalam menjaga keamanan nasional dan kepentingan pembangunannya. Kedua, untuk meminimalkan kesenjangan antara PLA (People's Liberation Army) dan militer terkemuka dunia. Ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan militernya dalam peperangan modern. Hal ini juga didukung oleh agenda dan program Tiongkok yang mendukung modernisasi pembangunan militer berkualitas tinggi serta mengembangkan inovasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi militer, memberikan pelatihan kepada personel militernya, mengembangkan logistik militer modern dan sistem manajemen peralatan seperti wacana peluncuran kapal induk ketiganya, pengembangan senjata nuklir, hingga peningkatan produksi jet tempur J-20 Beijing (Jash, 2022).

Modernisasi militer Tiongkok juga diperkuat dengan agresifnya aktivitas militer yang dilakukan bersama sekutu terdekatnya, Rusia. Hal ini terlihat dari kegiatan latihan bersama 10 armada kapal perang yang terdiri dari 5 kapal perang milik Tiongkok dan sisanya milik Rusia di kawasan Pasifik barat. Bagi Tiongkok, kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi strategis komprehensif yang

dilakukan Beijing dan sekutunya Moskow. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional bersama armada militer kedua negara. Rusia juga mendukung hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa latihan militer bersama tersebut merupakan bukti komitmen Rusia dan Tiongkok dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik (Lendon, 2021). Di tengah ancaman dari Amerika Serikat dan sekutunya dalam menentang dominasi Tiongkok di kawasan IndoPasifik, Tiongkok juga mulai berpikir untuk menyeimbangkan aliansi dengan membangun kerja sama militer dengan sekutunya, Rusia.

Mengutip salah satu pidato Presiden China "Xi Jinping", memastikan bahwa "Tiongkok dan Rusia perlu mengambil lebih banyak tindakan bersama untuk melindungi keamanan dan kepentingan kita secara lebih efektif, dan bahwa tidak ada aliansi formal antara kedua negara." Namun, Presiden China "Xi Jinping" mengkonfirmasi kepada mitranya dari Rusia, Putin, bahwa "hubungan ini bahkan melampaui aliansi antara kedua pihak". Dengan demikian, presiden Tiongkok dan Rusia mulai membentuk "infrastruktur keuangan independen", untuk mengurangi ketergantungan mereka yang besar pada bank-bank Barat dan paparan mereka terhadap langkah-langkah hukuman dari Barat. Melalui proposal mereka untuk mengadakan kemungkinan pertemuan puncak tripartit dengan India, itu dimulai dengan kunjungan Presiden Rusia "Putin" ke ibukota, New Delhi, dan pertemuannya dengan Perdana Menteri India "Narendra Modi" pada 12 september 2023, dan kemudian kesepakatan kedua pihak untuk India untuk mendapatkan sistem rudal S-500. Semua langkah Rusia dan Cina ini untuk menghalangi pengaruh AS dalam menanggapi aliansi yang ada melawan mereka(Helmy,2023).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

AUKUS adalah singkatan dari dan juga merupakan pakta kerja sama pertahanan strategis yang dilaksanakan oleh Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang diumumkan pada 15 September 2021. Di samping itu, pakta AUKUS juga ditujukan untuk mempererat kerja sama antara ketiga negara di kawasan Indo-Pasifik, yang mana menurut ketiga negara tersebut peningkatan pengaruh Tiongkok dianggap sebagai ancaman di kawasan.

Sebagai pengaturan berbagi informasi dan teknologi tiga arah, termasuk komitmen pertama kali oleh Amerika Serikat untuk berbagi teknologi propulsi nuklir dengan sekutu selain Inggris, AUKUS menyoroti secara tajam skala yang dirasakan dari ancaman yang ditimbulkan oleh China. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempublikasikan National Security Strategic Guidance pada awal 2021 yang menekankan pada sikap Tiongkok yang semakin agresif.

Dalam panduan tersebut, Presiden Biden menyebut Tiongkok sebagai satu-satunya kompetitor yang memiliki kapabilitas dalam mengkombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi, militer, dan teknologi hingga menimbulkan tantangan bagi sistem internasional yang stabil dan bebas.

Hal ini tentu saja terkait dengan meningkatnya ancaman Tiongkok di kawasan, sehingga Amerika Serikat dan sekutunya perlu memandang

kawasan IndoPasifik sebagai kawasan penting bagi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu, Australia sendiri memahami bahwa keterlibatannya ¹⁴ dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam pembentukan AUKUS telah menjadikan Australia sebagai negara yang akan menerima bantuan transformasi teknologi berupa kapal selam bertenaga nuklir sehingga pembentukan AUKUS sangat bermanfaat bagi Australia untuk melindungi nilai-nilai bersama serta memajukan keamanan dan kemakmuran dengan negara tersebut di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pakta pertahanan itu menciptakan harapan dan keyakinan yang tinggi bagi Australia untuk terlibat lebih jauh dalam menjaga stabilitas regional di tengah meningkatnya ancaman keamanan, terutama dari China.

Berdasarkan hasil penelitian terkait strategi Tiongkok dalam merespon pembentukan pakta AUKUS diperoleh hasil sebagai berikut, Kehadiran AUKUS sebagai wadah kerjasama baru di bidang keamanan tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada tahun 2021 telah menimbulkan berbagai reaksi di dunia internasional. Berbagai reaksi dari pro dan kontra pun membuat isu AUKUS menjadi sorotan topik penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat internasional. Salah satu yang paling menentang kehadiran AUKUS sebagai akronim dari kerja sama pertahanan dan keamanan, yakni China.

China, menanggapi perjanjian trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, melakukan *Speech Act* seperti kritik terbuka untuk menekankan bahwa perjanjian AUKUS berbahaya bagi banyak

pihak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan keras Tiongkok yang menilai bahwa kesepakatan ketiga negara tersebut merupakan model baru provokasi Barat. Tiongkok sendiri menilai AUKUS dapat menjadi ancaman bagi keamanan kawasan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Serta, Modernisasi militer Tiongkok juga diperkuat dengan agresifnya aktivitas militer yang dilakukan bersama sekutu terdekatnya, Rusia. Karena bagi China, kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi strategis komprehensif yang dilakukan Beijing dan sekutunya Moskow.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan Strategi Tiongkok dalam merespon pembentukan pakta AUKUS, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Diharapkan banyak negara-negara yang meningkatkan kerja samanya dengan negara lain dan meningkatkan atau memodernisasikan militernya agar keamanan regionalnya tidak terganggu.
2. Diharapkan pada pengkaji hubungan internasional hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini berdasarkan perspektif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. 2021. Macron tells Europe to ‘stop being naive’ after AUKUS row. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/28/macron-tells-europe-to-stop-being-naive-after-aukus-row>.
- Al Jazeera Staff. (2022). Red carpet rolled out in US bid to woo Pacific Islands from Tiongkok. *News* | Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2022/9/29/red-carpets-rolled-out-as-us-woes-pacificislands-from-china>
- Amin, K. (2019). Global-Local Interactions Volume I, No. 1. 2019. Global Local Interactions, I(1).
- Andrea, A. J., 2014. The Silk Road in World History: A Review Essay. *Asian Review of World Histories*, 2(1), pp. 105-127.
- Anjani, A., & Novita, D. (2021). *AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific*.
- BBC. 2021. Aukus: UK, US and Australia launch pact to counter China. <https://www.bbc.com/news/world-58564837>.
- BBC. (2021). Aukus: US and UK face backlash over Australia defense deal - BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-58592613>
- Boekenstein, G. 2021. AUKUS and Beyond – Managing the Messaging with our Indo-Pacific Partners. *Asia Society*. <https://asiasociety.org/australia/aukus-and-beyond-managing-messaging-our-indo-pacific-partners>.
- Brooke-Holland, L., Curtis, J., Mills, C., & Garraway, A. (2021). The AUKUS Agreement. October, 1–27. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9335/ChinaPower>. (2022). What Does Tiongkok Really Spend on its Military? /
- CFR, n.d. *China's Approach to Global Governance*. [Online] Available at: <https://www.cfr.org/china-global-governance/>
- ChinaPower Project. <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- Cheng, M. 2022. AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>.
- Choong, W. dan Storey, I. (2021). “2021/134 “Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability”. Tersedia di <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferation-and-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/>

- Cipto, B. (2018). *Strategi Tiongkok Merebut Status Super Power*. Pustaka Pelajar.
- Cordesman, A. H., & Yarosh, N. S. (2013). *Chinese Military Modernization and Force Development*. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, July 30, 2012, september.
- Cordesman, A. H., & Yarosh, N. S. (2013). *Chinese Military Modernization and Force Development*. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, July 30, 2012, september.
- CSIS. (n.d.). What Does Tiongkok Really Spend on its Military? Retrieved Februari 6, 2023, from <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- Din Aulia, J., & Sahide, A. (2022). *Regional Stability Rivalry in the Indo Pacific Region: China's Interests in Responding the AUKUS Trilateral Pact*. 9(9).
- Denisov, I., Paramonov, O., Arapova, E., & Safranchuk, I. (2021). Russia, China, and the concept of Indo-Pacific. *Journal of Eurasian Studies*, 12(1), 72–85. <https://doi.org/10.1177/1879366521999899>
- Department of Defence (Australian Government). 2020. *2020 Defence Strategic Update*. https://www.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/2020_Defence_Strategic_Update.pdf.
- Dollar, D., 2015. China's Rise as a Regional and Global Power. *Horizons*.
- Gardner, F., 2023. *Aukus submarine deal: Is conflict with Tiongkok getting closer?*. Available at: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-64959500>
- Gertz, B. (2017). Why America Should Fear China's Submarine Fleet | The National Interest. <https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-america-should-fear-chinas-submarine-fleet-21255>
- Gat, A., 2008. *War in Human Civilization*. Oxford: Oxford University Press.
- Grossman, D., 2023. *Why Tiongkok Should Worry About Asia's Reaction to AUKUS*. Available at: <https://www.rand.org/blog/2023/04/why-china-should-worry-about-asias-reaction-to-aukus.html>
- Harding, B., Freeman, C., Galic, M., Tugendhat, H., & Vandenbrink, R. (2021). Why the New U.S.-U.K.- Australia Partnership Is So Significant | United States Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2021/09/why-new-us-uk-australia-partnership-so-significant>
- Hartley, K., & Sandler, T. (2000). Defence and peace economics: A ten-year retrospective. *Defence and Peace Economics*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10430710008404935>

- Hass, R., 2020. *U.S.-Tiongkok Relations: The Search for a New Equilibrium*. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/02/FP_2020026_us_china_relations_hass.pdf
- Hawkins, A., 2023. 'Path of error and danger': Tiongkokangry and confused over Aukus deal. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2023/mar/16/outrage-confusion-china-reaction-aukus-deal>
- He, T., 2017. *One Belt, One Road: How Will Partners Profit?*. Available at: https://www.brinknews.com/one-belt-one-road-how-will-partners-profit/?utm_source=BRINK+Asia
- Helmy, N. (2023). *The impact of AUKUS against China and Russia on the security of Asia and the world*. <https://moderndiplomacy.eu/2023/03/20/the-impact-of-aukus-against-china-and-russia-on-the-security-of-asia-and-the-world/>
- Hurst, D. (2021). "China's response to Aukus deal was 'irrational', Peter Dutton says". Tersedia di <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/12/chinas-response-to-aukus-deal-was-irrational-peter-dutton-says>
- Jash, A. (2022). China's 2022 Defense Budget: Behind the Numbers - Jamestown. <https://jamestown.org/program/chinas-2022-defense-budget-behind-the-numbers/>
- Jervis, Robert. 1978. "Cooperation under Security Dilemma." *World Politics* 30 (2): 167-214.
- Khan, I., Imran, M., & Iqbal, H. (2019). Geo-Political Checkmate in the Indian Ocean Region: 21st Century Maritime Silk Road, Energy Security and Indo-US Nexus. *Journal of Islamic World and Politics*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.3233>
- Lee, L. (2021). AUKUS: China's wedge tactics won't divide India from the Quad. <https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/china-s-aukus-wedge-tactics-won-t-divide-india-from-the-quad-20210922-p58txk>
- Lendon, B. (2021). Why Russian and Chinese warships teaming up to circle Japan is a big deal | CNN. <https://edition.cnn.com/2021/10/25/asia/china-russia-naval-flotilla-circles-japan-intl-hnkml/index.html>
- Lobell, Steven E. 2017. "Structural Realism/Offensive and Defensive Realism." *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. doi:10.1093/acrefore/9780190846626.013.304.

- Magnier, M. (2021). "China's answer to Aukus alliance? More rhetoric, more intimidation tactics and more weapons". Tersedia di <https://www.scmp.com/news/china/article/3156858/chinas-answer-aukus-alliance-more-rhetoric-more-intimidation-tactics-and>
- Mole, D. 2021. Nuclear submarines could lead to nuclear power for Australia. *Australian Strategic Policy Institute (ASPI) The Strategist*. <https://www.aspistrategist.org.au/nuclear-submarines-could-lead-to-nuclear-power-for-australia/>.
- Morgenthau, Hans J. 1973. *Politics Among Nations*. New York: Knopf.
- Murphy, F. (2022). China, AUKUS countries clash at IAEA over nuclear submarine plan | Reuters. <https://www.reuters.com/world/china-aukus-countries-clash-iaea-over-nuclear-submarine-plan2022-09-16/>
- Novita, A. A. D. (2022). AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.883>
- Office, P. M. (2021). UK, US AND Australia launch new security partnership - GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-new-security-partnership>
- Outlook. 2021. China's Actions Constitute A Threat to Regional Peace in Indo-Pacific: Pentagon. <https://www.outlookindia.com/website/story/world-news-chinas-actions-constitute-a-threat-to-regional-peace-in-indo-pacific-senior-pentagon-official/377746>.
- Prayitno Candidate, H. (2021). *AUKUS and the role of ASEAN centrality in managing regional security affairs*. www.techniumscience.com
- Ramasamy, B., Yeung, M. & Laforet, S., 2012. China's outward foreign direct investment: Location choice and firm ownership. *Journal of World Business*, 47(1), pp. 17-25.
- Sarker, M. N. I., Hossin, M. A., Yin, X. & Sarkar, M. K., 2018. One Belt One Road Initiative of China: Implication for Future Global Development. *Modern Economy*, Issue 9, pp. 623-638.
- Schuman, M., 2023. *Tiongkok Could Soon Be the Dominant Military Power in Asia*. [Online] Available at: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/05/china-military-size-power-asia-pacific/673933/> [Accessed 6 Juli 2023].
- Shugart, T. 2021. Australia and the Growing Reach of China's Military. *Lowy Institute*. <https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-and-growing-reach-china-s-military>.

- Shinkman, P. D. (2021). Tiongkok Fires Back at 'AUKUS' Alliance With Violent Rhetoric: Australian Troops Would Be the First to Die. <https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2021-09-16/china-fires-back-aaukus-alliance-with-violent-rhetoric-australian-troops-would-be-the-first-to-die>
- Shoebridge, M. (2021). What is AUKUS and what is it not? ASPI Strategic Insights, December(December).
- Silver, C., 2022. *The Top 25 Economies in the World*. [Online] Available at: <https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/>
- SIPRI. (2015). The Military Balance. SIPRI: Stockholm
- Sky News Australia. (2021). (26) Australians singing anti-Tiongkok tune will 'shoot themselves in the foot': CCP - YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GMeUw40-dg4>
- Smith, A., 2019. *China's rise as world power*. [Online] Available at: <https://isreview.org/issue/112/chinas-rise-world-power/index.html>
- Southgate, L. 2021. AUKUS: The View from ASEAN. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2021/09/aukus-the-view-from-asean/>.
- Staunton, E. 2021. AUKUS: France's strategic outcry. *The Interpreter*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/aukus-france-s-strategic-outcry>.
- Sullivan, J. & Brands, H., 2020. *Tiongkok Has Two Paths to Global Domination*. [Online] Available at: <https://carnegieendowment.org/2020/05/22/china-has-two-paths-to-global-domination-pub-81908>
- Tewari, S. 2021. Aukus: UK, US and Australia pact signals Asia-Pacific power shift. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58540808>.
- Taliaferro, Jeffrey W. 2000. "Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited." *International Security* 25 (3): 128-161. <https://www.jstor.org/stable/2626708>.
- Waltz, Kenneth N. 1979. "Anarchic Structures and Balances of Power." In *Theory of International Politics*. Boston, U.S.: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wintour, P. 2021. What is the Aukus alliance and what are its implications? *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/politics/2021/sep/16/what-is-the-aukus-alliance-and-what-are-its-implications>.

- Wilkins, T. 2021. The AUKUS Trilateral Security Partnership and what It Means for Australia. *The Sasakawa Peace Foundation*. https://www.spf.org/iina/en/articles/thomas_03.html.
- Wolff, P., 2016. *China's 'Belt and Road' Initiative - Challenges and Opportunities*, Bonn: German Development Institute.
- World Bank. n.d. Military expenditure (current USD) – China. <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=CN&start=2000>.
- World Bank. (n.d.). Military expenditure (current USD) - China. Retrieved February 3, 2023, from <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=CN&start=1991>
- WPR, 2023. *How a Rising Tiongkok Has Remade Global Politics*. [Online] Available at: <https://www.worldpoliticsreview.com/how-a-rising-china-has-remade-global-politics/>
- Wright, G. 2021. AUKUS, a Golden Opportunity for “Global Britain”? *Institut Montaigne*. <https://www.institutmontaigne.org/en/blog/aukus-golden-opportunity-global-britain>.
- Xuanzun, L. (2022). Tiongkok boosts defense budget by 7.1% for 2022 amid complex global situation - Global Times. <https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254011.shtml>
- Yuan, S., 2021. *Just how strong is the Chinese military?*. Available at: <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/29/just-how-strong-is-the-chinese-military>
- Zhao, S., 2016. Tiongkok as a Rising Power Versus the US-led World Order. *Rising Powers Quarterly*, 1(1), pp. 13-21.

STRATEGI TIONGKOK DALAM MERESPON PEMBENTUKAN PAKTA AUKUS

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	3 %	6 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ijmmu.com Internet Source	2 %
2	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.unmul.ac.id Internet Source	1 %
4	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1 %
5	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %
6	link.springer.com Internet Source	<1 %
7	repository.iainsasbabel.ac.id Internet Source	<1 %
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
9	Submitted to Perguruan Tinggi Pelita Bangsa Student Paper	<1 %

10	Submitted to Winston Churchill Middle School Student Paper	<1 %
11	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	<1 %
18	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %
21	eprints.polsri.ac.id Internet Source	<1 %

22	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1 %
23	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
24	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.quireta.com Internet Source	<1 %
27	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
30	kabar-terhangat.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	repository.politanisamarinda.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
33	lapan6online.com Internet Source	<1 %

34 nadyasafira.student.umm.ac.id <1 %
Internet Source

35 www.voaindonesia.com <1 %
Internet Source

36 eprints.stikes-aisyiyah.ac.id <1 %
Internet Source

37 eprints.uns.ac.id <1 %
Internet Source

38 perkembanganmiliter.blogspot.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On